

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan pengelolaan limbah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam pemilu berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. APK yang digunakan secara masif oleh peserta pemilu seringkali menjadi limbah yang mencemari lingkungan karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai pengelolaannya setelah kampanye berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan yang berlaku dan memberikan solusi melalui sinkronisasi antara peraturan kepegiluan dan regulasi lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi KPU dan Bawaslu hanya mengatur pemasangan dan pencopotan APK secara administratif, belum menyentuh aspek pengelolaan limbah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur strategi pengelolaan limbah APK berdasarkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan melalui media digital. Penambahan ketentuan hukum ini menjadi penting agar pemilu tidak hanya demokratis, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Kata Kunci: Pemilu, Alat Peraga Kampanye, Limbah, Keberlanjutan Lingkungan, Pengaturan Hukum.

ABSTRACT

This research examines the regulation of campaign props (APK) waste management in elections based on the principle of environmental sustainability. APKs are massively used by election participants and often become waste that pollutes the

environment due to the absence of specific regulations governing their disposal after campaigns end. The purpose of this study is to analyze the existing legal framework and propose solutions through the synchronization of electoral and environmental regulations. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that KPU and Bawaslu regulations focus only on administrative aspects of APK installation and removal, without addressing comprehensive waste management. Therefore, a special regulation is needed to require waste management strategies based on the principles of reduce, reuse, recycle (3R), and to encourage more environmentally friendly campaigning through digital media. Legal provisions on sustainable campaign practices are essential to ensure that elections are not only democratic but also ecologically sustainable.

Keywords: Election, Campaign Props, Waste, Environmental Sustainability, Legal Regulation.